



PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDAPATAN  
SEKRETARIAT

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | NOMOR SOP   | : SOP/XIX.A.c.5/DISPENDA/2014   |
|  | TANGGAL PEMBUATAN   | : 17 Maret 2014   |
|  | TANGGAL REVISI  | :   |
|  | TANGGAL EFEKTIF   | : 31 Oktober 2014   |
|  | DISAHKAN OLEH   | : <b>SEKRETARIS DINAS PENDAPATAN PROVSU</b><br><br><b>HALINA, SH</b><br><b>PEMBINA TK. I</b><br><b>NIP. 19581225 198503 2 004</b> |
|  | NAMA SOP  | : <b>Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)</b>   |
| <b>DASAR HUKUM :</b>   | <b>KUALIFIKASI PELAKSANA :</b>  |   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li><li>3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 pada DIKTUM KETIGA tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;</li><li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;</li><li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</li><li>7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li><li>8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;</li><li>9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara;</li><li>10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara;</li><li>11. Rencana Strategis Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki Kemampuan Menyusun Rencana Kerja</li><li>2. Mengetahui Perencanaan Program dan Kegiatan</li><li>3. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Komputer</li></ol>       |   |
| <b>KETERKAITAN :</b>   | <b>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</b>   |   |
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Penyusunan RENSTRA</li><li>2. SOP Penyusunan RKA</li><li>3. SOP Surat Masuk</li><li>4. SOP Surat Keluar</li><li>5. SOP Penyusunan IKU</li><li>6. SOP Penyusunan DPA</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen RENSTRA</li><li>2. Dokumen RENJA Tahun Lalu</li><li>3. Komputer, Printer, Jaringan Internet, ATK</li><li>4. Dokumen Usulan Rencana Kegiatan Anggaran</li></ol> |   |
| <b>PERINGATAN :</b>  | <b>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</b>   |   |
| Jika SOP Penyusunan Renja tidak dibuat maka Penyusunan RKA tidak dapat dibuat  | Disimpan sebagai Softcopy dan Hardcopy  |   |